

Kondisi riil tingginya perubahan lingkungan dewasa ini, tentunya akan memberi dampak signifikan bagi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Ende. Oleh karena itu diperlukan telaahan terhadap isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi pada kurun waktu 2014-2019. Perumusan isu strategis diawali dengan telaahan atas permasalahan atau *gap* antara kondisi riil dan ideal yang ingin dicapai, secara khusus yang terkait layanan dasar yang wajib disediakan pemerintah daerah.

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan terdiri atas permasalahan terkait program pembangunan daerah dan permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

##### **a. Permasalahan terkait Program Pembangunan Daerah**

Permasalahan pada bagian ini dirumuskan berdasarkan telaahan capaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Ende periode RPJMD sebelumnya (RPJMD 2009-2014) dan target periode rencana (RPJMD 2014-2019), yang disinergikan dengan *platform kebijakan* atau janji politik Bupati dan Wakil Bupati Ende kurun waktu 2014-2019.

Berdasarkan hasil analisis dirumuskan permasalahan terkait Program Pembangunan Daerah, meliputi:

1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil, dan pedalaman. Data menunjukkan bahwa ruang kelas yang layak untuk tingkat SD/MI masih sebesar 56,06%, tingkat SMP/MTs sebesar 59,24%, SMA/MA sebesar 76,49% dan SMK masih sebesar 56,88%, dengan kondisi riil sebagian besar berada di daerah terpencil dan pedalaman.
2. Rendahnya kualitas proses pembelajaran, sebagai akibat belum meratanya distribusi tenaga pendidik yang berkompeten dan berkualitas, serta terbatasnya media pembelajaran yang sesuai standar pendidikan. Data menunjukkan sampai tahun 2013, guru berkeahlian/berkompeten untuk tingkat SD/MI hanya sebesar 19,07 % , dan yang telah lulus sertifikasi hanya sebesar 16,30%. Selain itu permasalahan ini diidentifikasi disebabkan karena keterbatasan utilitas daerah terpencil yang menyebabkan banyak tenaga pendidik tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal.
3. Terbatasnya sarana prasarana kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan pedalaman;
4. Masih tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu, yang disebabkan antara lain masih rendahnya status gizi balita dan gizi ibu hamil serta penanganan yang terlambat (aspek *supply & demand*). Angka kematian bayi pada tahun 2013 sebesar 15,01 per seribu kelahiran hidup atau terdapat 73 bayi meninggal dari total kelahiran hidup sebanyak 4.862 orang; sedangkan kematian ibu melahirkan masih sebesar 8 kasus dari toleransi sebesar 5 kasus.

5. Persebaran penduduk terpusat di wilayah perkotaan (34,43%), yang berimplikasi pada tingginya resiko sosial seperti pengangguran, kriminalitas dan keterbatasan ketersediaan tenaga kerja produktif di perdesaan.
6. Pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan keseimbangan antar wilayah secara proporsional. Data menunjukkan bahwa kurang lebih 58,86% PDRB Kabupaten Ende disumbangkan 4 (empat) wilayah perkotaan. Hal ini memengaruhi keseimbangan distribusi pendapatan masyarakat perdesaan dan perkotaan.
7. Dari sisi penggunaan perekonomian Kabupaten Ende didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba (56,48%). Investasi yang ditunjukkan dengan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto hanya sebesar 19,22 %, dengan kondisi neraca perdagangan menunjukkan nilai negatif, dimana ekspor hanya sebesar 14,10% sedangkan impor memberikan kontribusi 32,34%.
8. Sektor pertanian yang merupakan sektor dominan (32,86% dari PDRD), dan merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak (45,79% angkatan kerja), dari sisi produksi belum memberikan nilai tambah signifikan, akibat kurangnya pengelolaan pasca panen (investasi sektor pertanian), dan rantai pasar yang tidak menguntungkan petani (rendahnya nilai tukar petani).
9. Kelembagaan perekonomian perdesaan belum berjalan dengan baik, sehingga berakibat pada rendahnya posisi tawar petani dalam pemasaran;
10. Terbatasnya dukungan infrastruktur jalan dan ketersediaan energi listrik terutama pada daerah produktif, dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat terutama di wilayah perdesaan.
11. Terbatasnya ketersediaan jaringan air bersih untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat terutama di wilayah perdesaan.
12. Masih lemahnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang berimplikasi pada rendahnya layanan publik yang disediakan pemerintah. Beberapa indikator yang mengindikasikan permasalahan ini antara lain relatif tingginya SiLPA, minimnya proporsi alokasi anggaran publik pada APBD, terbatasnya keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran, masih lambatnya layanan perizinan, layanan kependudukan dan catatan sipil dan relatif rendahnya akses informasi kinerja pembangunan bagi publik;
13. Masih lemahnya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

#### **b. Permasalahan terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan pemerintah daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Analisis permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dilaksanakan dengan mengidentifikasi kinerja atau capaian pembangunan RPJMD 2009-2014 masing-masing urusan, dan relevansinya dengan kebijakan periode rencana. Dari hasil analisis diperoleh gambaran permasalahan umum terkait penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

**1. Urusan Pendidikan**

- Terbatasnya akses kelembagaan dan sarana prasarana PAUD
- Relatif rendahnya partisipasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan di bidang pendidikan (dewan pendidikan, yayasan, komite, pemerintah, swasta, masyarakat)
- Pemenuhan pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus (*difabel*)
- Kesejahteraan guru non sertifikasi yang belum setara dengan beban kerja dan kinerja.

**2. Urusan Kesehatan**

- Masih terdapat tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan setingkat SLTA, yaitu SPK, SPRG, SMF, SPAG, dimana tenaga-tenaga ini sampai dengan tahun 2015 harus sudah dengan gelar ahli madya (D-3)
- Masih tingginya penyakit-penyakit menular dan tidak menular serta penyakit yang berpotensi wabah
- Perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya masyarakat
- Ketersediaan obat-obatan, bahan habis pakai dan bahan reagensia laboratorium yang tidak sebanding dengan kebutuhan dan jumlah kunjungan pasien
- Kesadaran dan partisipasi masyarakat dan lembaga swasta dalam penanggulangan masalah kesehatan relatif rendah.

**3. Urusan Pekerjaan Umum**

- Terbatasnya layanan infrastruktur perkotaan seperti drainase, fasilitas pengelolaan sampah perkotaan dan antisipasi resiko kebakaran
- Tingginya kerusakan jaringan irigasi teknis
- Terbatasnya pembangunan infrastruktur jembatan perdesaan

**4. Urusan Perumahan**

- Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat
- Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, jamban) relatif rendah
- Ketersediaan basis data perumahan yang akurat dan komprehensif

**5. Urusan Penataan Ruang**

- Ruang terbuka hijau yang sangat terbatas dan cenderung menurun luasannya akibat intervensi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya
- Masih terjadinya pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang diatur dalam RTRW Kabupaten Ende
- Belum adanya dokumen turunan dari RTRW Kabupaten Ende, seperti: rencana detail tata ruang kota, rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana sistem drainase perkotaan, dan lain-lain produk tata ruang yang menjadi acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kabupaten Ende
- Penegakan ijin mendirikan bangunan (IMB) yang belum optimal dilaksanakan.

**6. Urusan Perencanaan Pembangunan**

- Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencana pada SKPD belum memadai
- Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal

- Inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
- Perumusan kebijakan pembangunan belum dilakukan melalui kajian akademis yang mendalam.

#### **7. Urusan Perhubungan**

- Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan baik kuantitas maupun kualitasnya
- Ketersediaan sarana transportasi darat untuk daerah pedalaman dan terpencil masih terbatas
- Masih rendahnya budaya tertib berlalu lintas para pemakai jalan dan pengguna jasa transportasi akan pentingnya keselamatan angkutan
- Belum terpenuhinya standar ketersediaan jumlah terminal dan optimalisasi pemanfaatan fungsi terminal yang sudah ada
- Kurangnya kesadaran pengusaha angkutan dan pengemudi melakukan pengujian kendaraan secara berkala.

#### **8. Urusan Lingkungan Hidup**

- Masih luasnya lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan
- Belum semua sungai dan danau yang ditetapkan status baku mutu lingkungannya
- Menurunnya kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) karena masih tingginya sedimentasi dan pelebaran badan sungai
- Belum optimalnya penyediaan ruang-ruang publik yang memadai dan pemanfaatannya untuk kebutuhan rekreasi bagi masyarakat (taman kota/kecamatan)
- Masih terbatasnya prasarana dan sarana penunjang pengelolaan persampahan seperti kualitas TPA, jumlah TPS dan jumlah sarana transportasi pengangkut sampah
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

#### **9. Urusan Pertanahan**

- Masih banyak tanah milik PEMDA dan masyarakat yang belum bersertifikat
- Belum adanya sistem pendataan tanah milik Pemerintah Daerah dan masyarakat secara baik.

#### **10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

- Penduduk migran belum terdokumentasikan secara baik
- Belum optimalnya kualitas pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan
- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan yang berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.

#### **11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan, politik dan pemerintahan
- Masih ada tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Masih ada buta huruf perempuan
- Belum optimalnya penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.

#### **12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

- Kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas tenaga penyuluh KB dan KS (PLKB, PPKBD, Sub PPKBD)
- Rendahnya peserta KB aktif dan KB mandiri
- Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menjadi peserta KB, di tengah kecenderungan semakin meningkatnya jumlah PUS

#### **13. Urusan Sosial**

- Meningkatkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan antar sektor
- Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
- Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

#### **14. Urusan Ketenagakerjaan**

- Kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah
- Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja
- Terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja.

#### **15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan koperasi
- Rendahnya sumberdaya kelembagaan koperasi dan akses pasar
- Masih adanya koperasi tidak aktif dan belum berbadan hukum
- Kurang optimalnya kerjasama koperasi dengan badan usaha lainnya
- Rendahnya minat kewirausahaan dan pengembangan mutu produk UMKM
- Terbatasnya sarana dan prasarana UMKM.

#### **16. Urusan Penanaman Modal**

- Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan merata
- Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya
- Lemahnya jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha
- Belum optimalnya penerapan Community Development (CD) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari pelaku usaha
- Belum adanya perda yang mengatur tentang investasi di Kabupaten Ende
- Daya dukung peluang-peluang investasi, terutama kesiapan lahan belum memadai.

#### **17. Urusan Kebudayaan**

- Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal
- Belum optimalnya pendayagunaan potensi budaya yang ada sebagai aset wisata dan peningkatan perekonomian masyarakat
- Data-data bidang kebudayaan belum terinventarisasi secara akurat dan lengkap
- Belum tersedianya informasi terkait kalender budaya tentang upacara- upacara adat yang diselenggarakan di perkampungan adat.
- Kurangnya keterlibatan dunia usaha dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya
- Kurangnya promosi, even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi pelesatariyan budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

#### **18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

- Terbatasnya ketersediaan sarana olahraga
- Terbatasnya akses untuk menyalurkan minat, bakat dan kreatifitas generasi muda
- Pembinaan organisasi kepemudaan masih terbatas.

#### **19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

- Pendidikan politik masyarakat masih rendah
- Masih terjadinya gangguan kemananan dan ketertiban masyarakat (sengketa tanah, perkelahian, penganiyaan, kenakalan remaja, prostitusi, kumpul kebo, miras, dan pencurian)

#### **20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**

- Masih terjadi tumpang tindihnya fungsi antar organisasi perangkat daerah (OPD)

- Belum semua desa/kelurahan menyelesaikan persehatian batas wilayah administrasi desa/kelurahan
- Masih terbatasnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur
- Terbatasnya sumber daya manusia aparatur di bidang pengadaan barang dan jasa
- Penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang belum mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK
- Belum semua aset daerah (bergerak dan tidak bergerak) didata dan memiliki legalitas
- Belum adanya Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan Anggaran
- Sistem pembinaan jenjang karir PNS belum didasarkan pada hasil peta jabatan, analisis beban kerja dan analisis jabatan
- Masih ada Perda yang belum dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya.

#### **21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa
- Kapasitas sumber daya aparatur lembaga kemasyarakatan desa yang masih terbatas
- Belum optimal kemitraan antar lembaga dan masyarakat di tingkat desa
- Menurunnya modal sosial, budaya gotong royong, di tingkat masyarakat Desa

#### **22. Urusan Statistik**

- Belum semua SKPD memiliki sistem pendataan yang baik akurat
- Belum ada sinkronisasi data antara SKPD dan pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan bank data dalam perumusan kebijakan pembangunan
- Koordinasi SKPD dengan BPS selaku lembaga resmi penyedia data belum optimal

#### **23. Urusan Perpustakaan**

- Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan
- Rendahnya minat baca masyarakat di perpustakaan
- Terbatasnya ketersediaan perpustakaan dan bahan bacaan di perdesaan.

#### **24. Urusan Kearsipan**

- Pengelolaan kearsipan di masing-masing SKPD belum baik
- Kurangnya tenaga arsiparis di masing-masing SKPD.

#### **25. Urusan Komunikasi dan Informatika**

- Penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan belum optimal;
- Belum semua SKPD memiliki Web Site

#### **26. Urusan Pertanian**

- Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian perkebunan dan peternakan;
- Belum optimalnya pembangunan pertanian berbasis kawasan.

#### **27. Urusan Ketahanan Pangan**

- Belum adanya lahan pangan abadi
- Penganekaragaman/ diversifikasi pangan masih terbatas
- Rendahnya kapasitas petani dalam penguasaan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil
- Masih terbatasnya tenaga penyuluh baik kuantitas dan kualitas (kompetensi penyuluh)
- Masih lemahnya kapasitas kelembagaan tani nelayan.

#### **28. Urusan Kehutanan dan Perkebunan**

- Masih luasnya lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan
- Belum optimalnya pelaksanaan peraturan daerah tentang pengelolaan hasil hutan
- Belum optimalnya konservasi hutan dan lahan

- Masih terjadi aktifitas perambahan hutan
- Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan terutama komoditi kakao, cengkeh, jambu mete dan kemiri
- Pemanfaatan lahan yang sama untuk menanam berbagai komoditas perkebunan (tumpang sari), sehingga memengaruhi produksi dan produktivitas komoditas perkebunan menjadi rendah.

#### **29. Urusan Kelautan dan Perikanan**

- Belum optimalnya kelembagaan produksi dan pemasaran hasil perikanan
- Rendahnya kualitas SDM nelayan dan pembudidaya dalam penguasaan teknologi
- Terbatasnya akses nelayan dan pembudidaya terhadap permodalan
- Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dibandingkan ketersediaan potensi lestarinya
- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, peralatan tangkap dan *cold storage*.
- Masih adanya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan lain-lain
- Pengembangan usaha budidaya masih bersifat spasial, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.

#### **30. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

- Belum optimalnya pemanfaatan air bawah tanah
- Belum adanya peraturan daerah tentang pengelolaan pertambangan yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan khususnya bahan galian C dan pertambangan rakyat
- Ketersediaan data base potensi pertambangan dan energi, sehingga menyulitkan pemerintah untuk menarik investor melakukan eksplorasi dan eksploitasi barang tambang yang ada di wilayah Kabupaten Ende.

#### **31. Urusan Pariwisata**

- Belum tersedianya rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (RIPPARDA)
- Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan belum melibatkan seluruh stakeholder di bidang pariwisata secara holistik
- Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan
- Minimnya promosi pariwisata.

#### **32. Urusan Perdagangan**

- Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi
- Belum optimalnya kegiatan promosi komoditi perdagangan sebagaimana diamanatkan UU No.7 tahun 2014
- Kurangnya akses sistim jaringan informasi perdagangan
- Masih banyaknya pelanggaran dalam aktivitas perdagangan.

#### **33. Urusan Perindustrian**

- Masih rendahnya jumlah dan kompetensi aparatur dan kelompok usaha kecil menengah
- Rendahnya nilai tambah hasil produksi sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan
- Pemanfaatan bahan baku lokal rendah
- Penguasaan teknologi masih rendah

#### **34. Urusan Ketramigrasian**

- Kurangnya kerjasama lintas sektoral dalam pemberdayaan kawasan transmigrasi
- Rendahnya kualitas sumber daya calon transmigran.

## 4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan program pembangunan daerah (prioritas utama), yang disinergikan dengan isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Adapun isu global, nasional dan regional provinsi NTT yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu strategis Kabupaten Ende sebagaimana disajikan pada tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1. Identifikasi Isu Strategis Global, Nasional dan Provinsi NTT

Isu Global	Isu Nasional	Isu Provinsi NTT
Meningkatnya proses demokratisasi dan penguatan tuntutan hak asasi manusia	Meningkatnya dinamika pelaksanaan otonomi daerah, termasuk pemberlakuan UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Peningkatan dan perluasan pembangunan pendidikan yang berkualitas
Berkembangnya pembangunan yang berorientasi MDGs	Tuntutan pelaksanaan reformasi birokrasi	Penguatan sistem kesehatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang universal, efisien, berkualitas dan berkelanjutan
Antisipasi krisis energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan	Meningkatnya gerakan anti korupsi dan penegakan supremasi hukum	Pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak
Perubahan iklim global ( <i>global waarning/climate change</i> )	Rendahnya daya saing, produktivitas dan nilai tambah produksi nasional	Percepatan pembangunan ekonomi yang berkualitas
Tuntutan kualitas produksi yang ramah lingkungan pada pasar global	Masih rendahnya mutu tenaga kerja	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam unggulan daerah
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang mendorong interaksi jejaring ekonomi, sosial, politik dan IPTEK sangat terbuka	Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan konektivitas intra dan antar pulau
Berkembangnya penyakit endemik HIV dan AIDS dengan fenomena gunung es		Rendahnya kinerja birokrasi dan minimnya pelayanan publik
Berkembangnya perdagangan narkoba dan obat-obatan psikotropika		Peningkatan kualitas dan pencegahan degradasi lingkungan hidup serta ketahanan perubahan iklim
Wilayah perbatasan Negara di darat dan laut sebagai daerah rawan perdagangan ilegal, penyelundupan dan imigran gelap		Pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan khusus
		Penanggulangan kawasan rawan bencana
		Penanganan kemiskinan

Sumber : RPJMD Provinsi NTT 2014-2018



Sejalan dengan isu global, nasional dan provinsi NTT, serta memerhatikan permasalahan utama yang harus diselesaikan selama kurun waktu 2014-2019, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Ende sebagai berikut:

1. ***Mutu dan aksesibilitas pendidikan termasuk pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas)***

Isu rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Ende terkait dengan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, sarana prasarana, dukungan manajemen, kurikulum serta kualitas peserta didik. Sementara itu isu aksesibilitas, terkait dengan keterbatasan akses masyarakat di daerah pedalaman dan terpencil, penduduk miskin dan akses kaum *disabilitas* terhadap pendidikan *inklusi*.

Kurangnya jumlah tenaga guru pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dan masih kurangnya guru yang bersertifikat sesuai yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen, mengakibatkan rendahnya kapasitas guru dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan kurikulum.

Terbatasnya sarana prasarana pendidikan termasuk buku, ruang kelas dan sarana kesehatan sekolah juga sangat memengaruhi kesiapan dan mutu anak dalam menerima pelajaran. Sementara, manajemen pendidikan yang belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien terutama karena desentralisasi pendidikan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, menjadi pendukung masih rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Ende

Faktor yang dicatat menjadi penyebab rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan adalah relatif rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, beban tanggungan keluarga miskin yang besar yang menyebabkan peluang anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan menjadi terhambat dan rendahnya partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dengan masih kurang aktifnya komite sekolah dalam menunjang proses pendidikan.

Adanya UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Wajar Dikdas, serta beberapa produk hukum yang mengatur sertifikasi guru dapat menjadi faktor kekuatan untuk merencanakan upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Beasiswa dan kerjasama pendidikan antar lembaga, antar daerah maupun antar negara dapat dipertimbangkan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan yang sama terutama kepada penduduk miskin dan kaum *disabilitas* yang berprestasi untuk dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih tinggi. Demikian pula, peningkatan standar sekolah melalui akreditasi serta kerjasama dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada dalam upaya peningkatan mutu guru seharusnya dijadikan peluang besar untuk membantu peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Ende.

Desentralisasi pengelolaan pendidikan juga sebenarnya merupakan salah satu faktor kekuatan dimana daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Jika didukung oleh komitmen yang kuat dari para penentu kebijakan dan kemampuan SDM yang berkualitas pengelola program pendidikan di tingkat daerah, maka desentralisasi pendidikan dapat menjadikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program di bidang pendidikan lebih efektif, efisien dan akuntabel

## 2. *Mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan*

Meskipun telah banyak kemajuan, angka kematian ibu, bayi dan balita, masih merupakan isu yang harus terus mendapat perhatian, selain isu jaminan kesehatan bagi penduduk miskin. Masih tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita di Kabupaten Ende tidak dapat dilepaskan dari permasalahan kurangnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan; keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan; kinerja petugas kesehatan di fasilitas kesehatan baik di tingkat pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan masih kurang mengutamakan pelayanan prima; masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat; serta kondisi lingkungan yang belum memadai yang tercermin antara lain dari kurangnya ketersediaan air bersih dan sarana sanitasi dasar.

Ditinjau dari sisi penyediaan sarana pelayanan kesehatan, meskipun Kabupaten Ende telah mempunyai cukup sarana pelayanan kesehatan yang tersebar baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa namun masih perlu didukung dengan peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan dan fasilitas penunjang. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, masyarakat di daerah perbatasan dan masyarakat di daerah terpencil, terisolir (secara fisik, sosial, dan ekonomi) juga masih perlu ditingkatkan.

Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan kesehatan, berbagai peluang yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan diantaranya adanya penerapan desentralisasi kesehatan yang memberi kesempatan kepada daerah untuk mengelola bidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Di tingkat masyarakat, upaya pembangunan kesehatan perlu dilakukan secara lebih komprehensif, *cost-effective* dengan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dalam bidang kesehatan. Identifikasi sumber daya dan kekuatan-kekuatan lokal perlu dilakukan dan digunakan sebagai landasan pengembangan program. Berbagai upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti STMB, Posyandu, pos obat desa dan lain-lain merupakan aset yang perlu terus ditingkatkan jumlah dan mutunya. Upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat perlu dimulai sejak usia dini melalui institusi pendidikan yang diiringi dengan penyediaan sarana sanitasi dasar yang memadai.

### 3. *Kemiskinan dan pengangguran*

Kemiskinan dan pengangguran masih merupakan isu pokok yang dihadapi Kabupaten Ende. Keadaan sampai tahun 2012 masih terdapat 55.300 penduduk miskin dan 2,84% angkatan kerja yang dikategorikan sebagai pengangguran terbuka. Banyak faktor yang menyebabkan penurunan kualitas hidup menjadi masyarakat miskin diantaranya sulitnya lapangan pekerjaan, naiknya harga-harga kebutuhan pokok sementara pendapatan tidak meningkat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup standar sebagaimana layaknya sehingga mereka menjadi masyarakat golongan miskin. Dengan tingginya angka penduduk miskin maka program-program yang bersifat jaring pengaman sosial hendaknya masih dipertahankan. Disamping itu untuk memberdayakan masyarakat miskin perlu ditindaklanjuti kegiatan atau program-program untuk meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam berusaha melalui kegiatan bimbingan teknis, bantuan peralatan dan bantuan modal sehingga dapat memberi lapangan pekerjaan.

### 4. *Pemanfaatan potensi ekonomi lokal, pengembangan industri dan investasi daerah*

Kabupaten Ende memiliki potensi ekonomi lokal seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan, dan pariwisata yang sangat menjanjikan, namun belum dioptimalkan pemanfaatan secara baik.

*Sektor pertanian* merupakan sektor dominan yang digeluti lebih dari 45 % penduduk, dengan produktivitas yang relatif rendah. Hal ini antara lain terjadi karena masih rendahnya tingkat pendidikan petani, penerapan teknologi belum sesuai anjuran serta sarana prasarana pendukung lainnya belum memadai. Produktifitas usaha tani lahan kering relatif rendah akibat kurang memerhatikan kaidah konservasi, sedangkan pada usaha tani lahan basah belum memberikan hasil yang optimal karena belum diterapkannya Panca Usahatani sesuai rekomendasi, serta jaringan irigasi yang tidak berfungsi optimal. Hal ini menyebabkan tidak terjaminnya kontinuitas ketersediaan produk pertanian baik jumlah maupun mutu.

Isu *sektor peternakan* berkaitan dengan pola pemeliharaan (budidaya) ternak yang belum dilakukan secara intensif. Disamping upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak yang belum optimal. Demikian juga pengetahuan dan ketrampilan peternak yang masih terbatas. Kedepan diharapkan adanya pola keterpaduan melalui integrasi di bidang pertanian dan peternakan, antara lain melalui pengembangan biogas dan sebagainya.

Sektor *kelautan dan perikanan* menjadi salah satu andalan Kabupaten Ende, dimana didukung dengan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di dua peisir wilayah Kabupaten Ende. Namun demikian, pengembangan sektor ini dihadapkan dengan permasalahan seperti masih adanya kegiatan pemboman ikan (*illegal fishing*), terbatasnya sarana penangkapan ikan yang dimiliki nelayan dan pola penangkapan yang masih bersifat tradisoional. Sektor perikanan dan kelautan dapat diarahkan menjadi sektor unggulan. Pemerintah perlu merencanakan upaya pemberdayaan

nelayan antara lain melalui fasilitasi dalam penyediaan peralatan dan permodalan, kemitraan dengan perusahaan besar, penanganan pasca panen dan pemasaran.

Pengembangan *sektor kehutanan dan perkebunan* juga menjadi perhatian yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Ende, karena didukung oleh karakteristik wilayah dan kesesuaian lahan. Namun demikian, peranan sub sektor perkebunan (perkebunan rakyat) terhitung masih kecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Ende, walaupun secara absolut nilai tambah yang diberikan oleh sub sektor ini meningkat terus menerus setiap tahunnya. Beberapa isu yang perlu mendapat perhatian antara lain: masih maraknya kegiatan penebangan liar (*illegal logging*), penggundulan hutan, banyaknya lahan kritis, serta serangan hama dan penyakit pada tanaman perkebunan (kelapa, kakao, jambu mete). Peranan sub sektor perkebunan perlu terus ditingkatkan dan diharapkan menjadi penghasil bahan mentah untuk menunjang agroindustri baik dalam skala kecil dan atau menengah. Selain itu sub sektor perkebunan juga diharapkan berperan dalam mendorong pemerataan, pertumbuhan dan dinamika ekonomi di perdesaan.

Kebijakan nasional di bidang *pariwisata* yang tercantum dalam Master Plan Pariwisata Nasional adalah pengembangan Kawasan Taman Nasional Kelimutu sebagai salah satu dari 16 destinasi wisata nasional. Selain itu terdapat potensi wisata lainnya seperti Situs Bung Karno, wisata adat dan budaya, wisata bahari yang dapat dikembangkan di Kabupaten Ende. Permasalahan mendasar yang ditemui adalah pengelolaan obyek-obyek wisata yang belum dilakukan secara terintegrasi. Upaya pembangunan sektor pariwisata perlu melibatkan berbagai pihak terkait dan dikemas dalam konsep pengembangan wisata terkini.

Pembangunan sektor *industri dan perdagangan* sangat erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur perdagangan masih terbatas terutama aktifitas pelabuhan laut sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan stok dan tingkat harga. Selain itu masih sering terjadi pelanggaran perdagangan seperti penjualan barang kadaluarsa, dan praktik negatif perdagangan terutama kalangan pedagang eceran dan kaki lima. Pada sektor industri, optimalisasi industri kecil dan menengah juga merupakan isu penting. Pembangunan industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan rumah tangga harus terus dibina agar menjadi usaha mandiri dan mempunyai daya saing, dan pada gilirannya memberikan kontribusi signifikan bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pengembangan *investasi dan penanaman modal* juga dihadapkan pada permasalahan keterbatasan ketersediaan infrastruktur baik prasarana darat, laut dan udara, kepemilikan lahan yang masih didominasi oleh tanah persekutuan adat, pengurusan administrasi izin penanaman modal dan investasi, serta masih kurangnya promosi terhadap potensi daerah dan peluang investasi kepada pihak investor baik melalui media cetak maupun elektronik ataupun kegiatan *expose* kerjasama dengan lembaga terkait baik berskala regional maupun nasional. Untuk itu, dalam rencana

pembangunan jangka menengah, perlu memerhatikan akses terhadap promosi dan pemasaran produk, ketersediaan data-data perkembangan sektor ekonomi yang akurat dan terpilah sesuai kebutuhan para pengguna data (*user*) baik dalam bentuk data elektronik yang *on line* dan *off line* (leaflet, buklet, buku profil unggulan daerah) sehingga mempermudah para investor untuk menanamkan modalnya sesuai dengan komoditi unggulan daerah.

5. ***Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis (jalan, jembatan, air, irigasi, listrik) serta kualitas lingkungan hidup***

Kondisi infrastruktur masih merupakan isu yang harus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Ende. Infrastruktur dasar dan strategis menjadi vital karena sangat berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi infrastruktur dasar yang memadai menjamin kelayakan hidup masyarakat, serta dalam skala yang lebih luas menjamin kegiatan usaha produktif masyarakat. Infrastruktur dasar yang menjadi isu meliputi kondisi jalan, jembatan, ketersediaan air bersih, irigasi dan energi listrik.

Pembangunan lingkungan hidup, masih dihadapkan pada permasalahan luasnya lahan kritis, penurunan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) karena masih tingginya sedimentasi dan pelebaran badan sungai, penyediaan ruang-ruang publik yang memadai dan pemanfaatannya untuk kebutuhan rekreasi bagi masyarakat (taman kota/kecamatan). Selain itu dalam rangka pengelolaan persampahan dihadapkan pada persoalan keterbatasan prasarana dan sarana penunjang pengelolaan persampahan seperti kualitas TPA, jumlah TPS dan jumlah sarana transportasi pengangkut sampah, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

6. ***Tata kelola pemerintah dan perlindungan perempuan dan anak***

Salah satu agenda pembangunan nasional dan daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sementara itu, kondisi birokrasi saat ini masih dihiasi oleh gambaran tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, pelanggaran disiplin, rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, tidak adanya kepastian waktu pelayanan, tidak transparan, dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang. Oleh karena itu perlu diperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui perampingan struktur organisasi, pembangunan sistem dan regulasi yang memadai di dalam perekrutan dan pola karir aparatur dengan mengutamakan profesionalisme, pemenuhan prasarana dan sarana pemerintahan, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta peningkatan etika kepemimpinan.

Dalam hal kapasitas keuangan daerah, masalah yang dijumpai antara lain terbatasnya efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, belum efisiennya prioritas alokasi belanja daerah, serta terbatasnya kemampuan pengelolaannya termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme.

Pada tataran masyarakat, dihadapkan pada permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin dalam merumuskan perencanaan dan pengawasan pembangunan sehingga seringkali proses pembangunan kurang membawa pesan dan kebutuhan masyarakat miskin.

Pemberdayaan perempuan merupakan isu yang sering diperbincangkan, karena itu kesetaraan peran laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender) merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Masalah utama pembangunan pemberdayaan perempuan adalah masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan budaya. Budaya patriarki berpengaruh besar terhadap masalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan. Budaya patriarki mengakibatkan perempuan berada pada posisi tawar yang lemah. Pengambilan keputusan yang hirarkis juga telah meminggirkan perempuan secara sistematis dalam beberapa kebijakan, program dan lembaga yang tidak responsif gender. Situasi ini ditandai oleh kurangnya jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga pemerintah dan politik. Di samping itu, adanya gejala kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan dalam rumah tangga menambah permasalahan yang dialami oleh kaum perempuan.

Isu yang berkaitan dengan perlindungan anak adalah kecenderungan meningkatnya kasus kekerasan, eksploitasi terhadap anak dan adanya gejala perdagangan anak (*trafficking*) menunjukkan bahwa perlindungan anak masih jauh dari yang diharapkan. Disamping itu, upaya perlindungan anak belum dirumuskan secara mendetail dalam program sehingga kesulitan dalam melakukan koordinasi penanganannya. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal untuk mencegah terjadinya penelantaran dan kekerasan terhadap anak.

**7. *Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa***

Dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, desa diberikan ruang yang lebih besar dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Salah satu isu penting adalah alokasi dana yang cukup besar kepada desa untuk mengelola anggaran dengan rata-rata 1 Milyard per desa. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut, maka dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Ende diharapkan melakukan upaya-upaya pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik dan kemampuan pengelolaan keuangan desa. Demikian pula masyarakat desa

perlu dipersiapkan untuk menjadi mandiri dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa, agar hasil-hasil pembangunan yang dilakukan dapat secara langsung mengatasi berbagai permasalahan dasar yang dialaminya selama ini.